

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Hamid, Hamrat. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penterjemah M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm. 3-35.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mohammad, AbdulKadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Prodjohomidjojo, Martiman. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia Latar Belakang dan sejarahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Soekanto, soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, S., Tjandrasari, , & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta. 2014
- Sunggara, M. A, Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Solusi*, 138-154
- Sunggono, B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. Et al, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka/terdakwa Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Yaman dan Nurtin Taringan. 2019. “*Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*”I. Jakarta: Kencana.

## 2. Jurnal

- Andry Rahman Arif. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung”. *Jurnal Hukum*. Vol. 9 No. 1 (Januari-Maret 2015) : hlm 106. Diperoleh dari <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-PB.pdf>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul 14.21 WIB.
- Elcaputra, A. (2021). “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu”. *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.
- Soerjono Soekanto, *OP Cit*, hlm. 37. Lihat juga Hana Faridah, “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bingkai Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2024, hlm. 211-225

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” dalam *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya*. Jakarta: Permata Press, t, th.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” dalam Munir Fuady. *Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” dalam Munir Fuady. *Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembaruan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” dalam Munir Fuady. *Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” dalam Bambang Sunggono Dan Aris Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” dalam *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya*. Jakarta: Permata Press, t, th.
- Keputusan Menteri Nomor M. 11. HT-HT-04-02 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Dan Tata *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya*. Jakarta: Permata Press, t, th. Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum,” dalam *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya*. Jakarta: Permata Press, t, th.

#### 4. Wawancara

- Irwan Yanwar Siregar, Ka. Subsidi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat, 19 Juni 2024
- Setiawan Mahendra, Staff Ka. KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juni 2024

#### 5. Internet

- [www.lbh-medan.go.id/web/tahun-2023-posbakum](http://www.lbh-medan.go.id/web/tahun-2023-posbakum), diakses pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024.
- [www.ylbhi.org.id/web/tahun-2023-bantuanhukumyangdiberi](http://www.ylbhi.org.id/web/tahun-2023-bantuanhukumyangdiberi), diakses pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024.
- [www.AAI.com](http://www.AAI.com) Mengurai UU Bantuan Hukum Opini. Diakses pada hari senin tanggal 25 Maret 2024.
- [www.PHBI.com/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html](http://www.PHBI.com/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html). Diakses pada hari senin tanggal 15 April 2024